

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perusahaan pada dasarnya didirikan guna menciptakan nilai tambah, terutama dalam menghasilkan laba. Perkembangan dunia usaha pada dekade terakhir ini mulai banyak dipengaruhi adanya perubahan pada keadaan lingkungan ekonomi. Adanya perubahan tersebut memunculkan suatu paradigma baru di dunia usaha yang awalnya *profit oriented only* menjadi berorientasi pada tiga hal yang sering disebut dengan *Triple-P Bottom Line*, yaitu *profit*, *planet*, dan *people* (Pratiwi dan Chariri, 2013). Menurut Fajriah (2014), pergeseran paradigma tersebut juga memaksa perusahaan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan masalah sosial dan lingkungan sesuai dengan konsep akuntabilitas.

Menurut Pratiwi dan Chariri (2013), kemungkinan terjadinya masalah sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan, maka sudah selayaknya entitas bisnis bersedia untuk menyajikan suatu laporan yang dapat mengungkapkan bagaimana kontribusi mereka terhadap berbagai permasalahan sosial yang terjadi disekitarnya. Permasalahan lingkungan hidup yang semakin meningkat telah menjadi perhatian banyak kalangan seperti aktivis lingkungan, *investor*, pemerintah, dan masyarakat umum sehingga mendorong perusahaan

untuk membuat sebuah solusi demi mengatasi tuntutan *stakeholders*. Perwita (2009) dalam Paramitha dan Rohman (2014) menyatakan bahwa perusahaan dapat memperlihatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dengan melalui *environmental disclosure* yaitu pengungkapan informasi mengenai tanggung jawab lingkungan dalam instrumen laporan keuangan.

Pentingnya pengungkapan lingkungan dijabarkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 tahun 2007. UU tersebut menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Sejalan dengan UU tersebut, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 (PSAK) paragraf kesembilan juga mendukung masalah pelaporan pengungkapan lingkungan yang menyatakan bahwa perusahaan dapat menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.

Tata kelola perusahaan yang baik atau sering disebut dengan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu yang memiliki peran penting dalam keberhasilan perusahaan. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik diharapkan mampu melakukan pengawasan dan pengendalian sehingga menciptakan nilai tambah bagi perusahaan (Khasanah, 2014). Tata kelola perusahaan merupakan cara yang efektif untuk menggambarkan hak dan

tanggung jawab masing-masing kelompok *stakeholder* dalam sebuah perusahaan dimana transparansi merupakan indikator utama standar tata kelola perusahaan dalam sebuah ekonomi.

Menurut Suhardjanto (2010), adanya *corporate governance* yang baik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, sehingga tanggung jawab lingkungan hidup akan diungkapkan dalam *annual report*. *Global Reporting Initiatives* (GRI) merekomendasikan beberapa aspek lingkungan yang selayaknya diungkapkan dalam *annual report*. Ada 12 aspek dalam 34 item yang direkomendasikan oleh GRI G.4. Kesembilan aspek tersebut adalah: bahan, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, efluen dan limbah, produk dan jasa, kepatuhan, transportasi, lain-lain, asesmen pemasok atas lingkungan dan mekanisme pengaduan masalah lingkungan. Etteredge *et al.*, (2010) dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa kualitas tata kelola perusahaan memiliki hubungan positif dengan kualitas kepatuhan pengungkapan.

Peran penting dalam melaksanakan tata kelola perusahaan berada pada dewan komisaris yang berfungsi sebagai pengawas aktifitas dan kinerja serta sebagai penasihat direksi dalam memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tsts kelola perusahaan yang baik (KNKG, 2011). Proporsi dewan komisaris independen merupakan variabel yang sering digunakan untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap *environmental disclosure*. Uwuigbe (2011) menunjukkan terdapat hubungan positif antara proporsi dewan komisaris independen dengan *environmental disclosure*.

Kinerja dan tugas dewan komisaris untuk mengawasi jalannya perusahaan akan efektif bila masing-masing anggota dewan aktif hadir dalam pertemuan dewan komisaris (*corporate governance guidelines*, 2007). Peretemuan dewan komisaris ini dilakukan baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya.

Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan berfungsi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pratama dan Rahardja (2013) juga menyatakan bahwa keberadaan komite audit dalam perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, sehingga perusahaan dapat terhindar dari risiko yang dapat memperburuk kinerja perusahaan. Healy dkk. (1999) dalam Fajriah (2014) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan kualitas pengungkapan dan tingginya level kepemilikan institusional diukur dengan *AIMR rating*. Institusi yang aktif dalam *corporate governance* lebih memilih perusahaan dengan pengungkapan yang lebih informatif dibandingkan perusahaan yang tidak transparan dalam melakukan pengungkapan lingkungannya.

Selain tata kelola perusahaan yang baik, variabel ukuran perusahaan pada karakteristik perusahaan juga dapat mempengaruhi pengungkapan lingkungan. Menurut Mirfazil dan Nurdiono (2007) besarnya dampak lingkungan hidup tergantung pada karakteristik perusahaan. Dengan kata lain, karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan misalnya semakin besar perusahaan semakin besar pula dampaknya terhadap kualitas

lingkungan hidup (Suhardjanto, 2010). Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan besar harus bertanggung jawab lebih mengenai pengungkapan lingkungan karena memiliki dampak yang lebih besar dari lingkup sosial mengingat perusahaan besar memiliki *stakeholder* yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil (Cowen *et al.*, 1987).

Pada kenyataannya, perusahaan-perusahaan di Indonesia masih memiliki perhatian yang sangat rendah terhadap permasalahan tanggung jawab sosial terutama mengenai dampak terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan dari aktivitas yang ditimbulkan oleh perusahaan. Effendi dkk. (2012) menyatakan bahwa hal tersebut dapat dilihat dari adanya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mendapatkan sorotan negatif atas terbengkalainya pengelolaan lingkungan, kerusakan yang diakibatkan, dan rendahnya minat perusahaan terhadap konversi lingkungan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ariningtika dan Kiswara (2013). Fokus penelitian adalah untuk menguji pengaruh variabel tata kelola perusahaan yang meliputi proporsi dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, dan jumlah rapat komite audit dengan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2011.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariningtika dan Kiswara (2013). Pada variabel tata kelola perusahaan, peneliti menghilangkan variabel jumlah rapat komite audit, karena

pada penelitian terdahulu banyak ditemukan hasil yang tidak signifikan terhadap variabel tersebut. Peneliti juga menambahkan variabel kepemilikan institusional. Menurut Habib dan Jiang; Shan dalam Kathyayini (2012) menyatakan bahwa konsentrasi dalam kepemilikan merupakan aspek penting dari tata kelola perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya.

Penelitian ini juga menambahkan karakteristik perusahaan yakni ukuran perusahaan. Menurut Mirfazil dan Nurdiono (2007) dampak lingkungan perusahaan tergantung pada jenis atau karakteristik perusahaan. Cowen *et al.*, (1987) menyatakan bahwa perusahaan besar berada dalam tekanan untuk mengungkapkan aktivitas mereka untuk melegitimasi bisnis mereka karena perusahaan besar melakukan aktivitas yang lebih banyak, memiliki pengaruh yang lebih besar kepada masyarakat, memiliki pemegang saham yang mungkin peduli dengan program lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, dan laporan tahunannya lebih efisien dalam mengkomunikasikan informasi tersebut kepada *stakeholder*. Selain itu dalam pengambilan sampel penelitian dilakukan di Indonesia yang berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2014.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dari variabel struktur *corporate governance* ditemukan adanya *research gap* antara penelitian satu dengan yang lain (Rahmi, 2014). Untuk itu, dalam penelitian ini mencoba untuk menulis

kembali kajian tentang pengaruh proporsi dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, dan kepemilikan institusional sebagai proksi dari struktur tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan lingkungan di sebuah perusahaan dengan maksud untuk membuktikan dan menyelesaikan persoalan *research gap* serta mengevaluasi untuk kerja (*performance*) atau kinerja perusahaan dalam melakukan usaha bisnisnya terhadap lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji lebih dalam terkait pengungkapan lingkungan dilakukan secara sukarela serta pengaruh tata kelola perusahaan yang baik dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. Untuk kerja suatu perusahaan sangat penting diketahui oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terutama pada perusahaan-perusahaan besar, agar kinerja perusahaan dapat ditingkatkan. Dengan hal itu, secara otomatis keuntungan perusahaan dapat meningkat. Terdapat beberapa penelitian yang mengemukakan hasil signifikan antara tata kelola perusahaan yang baik terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan, diantaranya: Uwigbe (2011); Ariningtika dan Kiswara (2013); dan Pratama dan Rahardja (2013). Adapun penelitian yang mengemukakan hasil signifikan antara karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan, antara lain: Hadjoh dan Sukartha (2013) dan Paramitha dan Rohman (2014).

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang permasalahan dan kajian atas penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis akan meneliti hubungan antara tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan

lingkungan dengan judul **“Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan”**.

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, variabel yang peneliti gunakan dalam tata kelola perusahaan diantaranya adalah: proporsi dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, dan kepemilikan institusional. Sedangkan pada variabel yang digunakan dalam karakteristik perusahaan adalah ukuran perusahaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan?
2. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan?
3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.
2. Untuk menguji pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.
3. Untuk menguji pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.
4. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.
5. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai pengungkapan lingkungan pada laporan keuangan perusahaan manufaktur, serta variabel determinan yang mempengaruhi pengungkapan informasi lingkungan pada laporan keuangan perusahaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan kajian agar lebih memerhatikan pengelolaan lingkungan dan memberikan kebijakan mengenai perlindungan terhadap lingkungan untuk perusahaan. Dapat memberikan masukan terhadap kekurangan mengenai peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait pertanggungjawaban lingkungan dalam perusahaan terhadap lingkungan yang telah diatur, Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

b. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan dalam melestarikan lingkungan terhadap pengelolaan limbah yang berkelanjutan agar kelestarian lingkungan dapat tetap terjaga sejalan dengan proses produksi yang dihasilkan perusahaan. Dan dapat memberikan masukan dalam perbaikan penerapan *corporate governance* dan pelaporan aktivitas lingkungan hidup dalam *annual report*. Dapat membuat manajemen semakin memerhatikan pentingnya pengungkapan lingkungan pada laporan keuangan perusahaan mengingat pada lingkungan institusional sekarang, banyak pengungkapan tanggung jawab sosial bersifat sukarela dan tidak diaudit. Sehingga manajemen diharapkan untuk mengubah pengungkapan sukarela dan memperluasnya menjadi

pengungkapan yang merefleksikan semua aspek dari kinerja perusahaan yang terkait.

c. *Bagi Stakeholder*

Bagi *stakeholder* seperti investor, kreditor dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Dapat menjadi acuan tambahan dalam menganalisis informasi yang disajikan oleh perusahaan berkenaan dengan *corporate governance* dan *environmental disclosure* dalam *annual report*.